

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil. Melalui mekanisme simpan pinjam, koperasi memberikan alternatif pembiayaan dengan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga perbankan formal sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Namun demikian, aktivitas pembiayaan selalu mengandung risiko, khususnya risiko terjadinya kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan besar bagi banyak koperasi di Indonesia (Jalaludin, 2021). Dalam konteks teori manajemen risiko, koperasi perlu menerapkan sistem pengawasan yang kuat agar NPL dapat ditekan, sebagaimana penekanan pentingnya pengendalian akuntansi dan manajemen dalam menjaga kualitas kinerja lembaga keuangan (Hery, 2014; Firmansyah & Sinambela, 2020).

Sebagai entitas ekonomi berbadan hukum, koperasi di Indonesia berorientasi pada eskalasi kesejahteraan anggotanya melalui tata kelola yang berpijak pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Regulasi ini mengintegrasikan prinsip dasar, permodalan hingga mekanisme usaha simpan pinjam dalam satu kerangka legal. Secara konstitusional, eksistensi koperasi merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang memandatkan struktur ekonomi berbasis usaha bersama dan asas kekeluargaan. Konsep ini menempatkan anggota dalam posisi strategis sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa (Juliarsa, 2018).

Dalam konteks operasional Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Genteng mengemban fungsi intermediasi keuangan dengan menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman sesuai dengan Peraturan Menteri KUKM Nomor 20/2008. Mengingat aktivitas ini menghasilkan piutang yang diklasifikasikan sebagai aset lancar, penerapan sistem pengendalian internal menjadi urgensi yang tidak dapat ditawar. Sistem ini berfungsi sebagai instrumen preventif dalam menjaga keamanan aset, menjamin akurasi

pelaporan keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian demi meminimalisasi risiko penyimpangan.

Risiko kredit merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja keuangan suatu lembaga, karena berkaitan langsung dengan potensi kerugian akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya (Fuadah et al., 2022). Mengingat kredit merupakan aset produktif utama, kegagalan pengelolaannya dapat berdampak langsung pada stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasional. Maka dari itu, risiko kredit menjadi fokus strategis dalam sistem pengelolaan risiko. Di Indonesia, tingkat risiko kredit umumnya diukur melalui rasio Non-Performing Loan (NPL) yang berfungsi sebagai indikator kesehatan bank (D. M. N. Putri & Zakik, 2022). Seiring dengan digitalisasi sektor keuangan, pengelolaan risiko kredit semakin kompleks dan menuntut pemanfaatan teknologi analitik (Scott et al., 2024).

Penelitian Fang (2025) menunjukkan bahwa penggunaan *big data* dan *machine learning* mampu meningkatkan ketepatan analisis kredit serta menurunkan potensi gagal bayar. Namun, perkembangan teknologi finansial juga memunculkan risiko baru, seperti fraud dan ketidakpastian regulasi sehingga diperlukan kerangka pengaturan yang adaptif dan responsif (Prastyanti, 2023). Tingginya kredit bermasalah terbukti berdampak negatif terhadap profitabilitas lembaga keuangan dan kepercayaan publik serta berpotensi mengganggu stabilitas sistem lembaga keuangan secara keseluruhan (Marina & Marlina, 2015; Lintang & Ardillah, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kredit bermasalah bukan sekadar proses administratif melainkan bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko bank.

Pemahaman mengenai faktor penyebab, mekanisme penyelesaian serta aspek hukum kredit bermasalah menjadi sangat penting dalam praktik lembaga keuangan modern (Abdullah, 2020). Secara empiris, kredit bermasalah sering kali berakar pada kelemahan pengendalian internal khususnya pada tahap analisis kelayakan, monitoring pascapencairan dan evaluasi kualitas kredit (A. E. T. Putri et al., 2024). Fenomena ini mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan internal baik dalam aspek verifikasi, pemantauan maupun pelaporan

yang berpotensi meningkatkan risiko NPL. Temuan ini sejalan dengan kajian (I. Dewi & Widhiyani, 2018a) yang menegaskan peran kualitas audit dalam memastikan efektivitas pengendalian internal.

Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam sebuah entitas bisnis diarahkan untuk mencapai empat tujuan fundamental yaitu memfasilitasi kebutuhan informasi bagi unit usaha baru, mengoptimalkan kualitas output sistem yang berjalan, memperkuat mekanisme pengendalian dan verifikasi internal demi keandalan data serta proteksi aset, serta meminimalkan beban administratif dalam pencatatan akuntansi (Betavia et al., 2022).

Koperasi dalam memberikan kredit kepada nasabah harus mempunyai Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang baik agar tidak terjadi suatu kesalahan atau kecurangan dalam mencatat langsung dari dokumen secara teliti pada saat terjadinya transaksi. Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yang membentuk suatu sistem yang berurutan dan berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit (Fariyah et al., 2021).

Mengingat kompleksitas strukturnya, efektivitas SIA sangat bergantung pada kompetensi manajerial dan intensitas pelatihan yang diterima oleh praktisi keuangan. Sistem ini berkaitan erat dengan transparansi pengungkapan informasi yang menjadi instrumen utama pengendalian internal. Tanpa protokol pengendalian yang jelas perusahaan rentan terhadap risiko kerugian signifikan yang sering kali tidak terdeteksi secara dini. Sebaliknya, pengendalian internal yang kokoh berfungsi sebagai pengawal kinerja dan profitabilitas, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum. Dalam dimensi sumber daya manusia, pencapaian target organisasi sangat ditentukan oleh performa karyawan (Devrin et al., 2022).

Semakin tingginya tingkat persaingan antar bank dan risiko perkreditan, menyebabkan pihak manajemen Bank perlu menerapkan suatu pengendalian yang memadai. Pengendalian yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik perusahaan dengan meminimalisasikan kemungkinan

terjadinya penyelewengan, pemborosan, kemacetan kredit serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan pengendalian yang memadai diharapkan proses pemberian kredit dapat berjalan lancar (Effendi & Harahap, 2020).

Salah satu pilar utama pengelolaan risiko adalah penerapan pengendalian internal yang efektif. Kerangka pengendalian internal membantu menata alur proses pemberian kredit mulai dari seleksi peminjam, verifikasi kemampuan bayar, penentuan jaminan, hingga pemantauan dan penagihan. Prinsip-prinsip seperti pemisahan tugas, otorisasi yang jelas, pencatatan yang andal, dan pengawasan berkala menurunkan peluang terjadinya kesalahan, penyimpangan, dan kredit macet. Kerangka COSO menonjolkan bahwa pengendalian internal bukan hanya prosedur administratif, tetapi bagian dari budaya tata kelola yang melindungi aset dan meningkatkan keandalan pelaporan (COSO, 1992).

Di era digital, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi (Zamzami et al., 2021).

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) saat ini tengah menghadapi eskalasi risiko kredit sistemis yang dipicu oleh dampak residual pandemi, volatilitas ekonomi makro serta disparitas dalam transisi digital. Fenomena krusial yang mengemuka adalah lonjakan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang tidak semata-mata diakibatkan oleh faktor eksternal melainkan diperburuk oleh ketidaksiapan infrastruktur internal terutama pada aspek Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan mekanisme pengendalian internal (A. E. T. Putri et al., 2024).

Keterbelakangan SIA yang bersifat reaktif sering kali masih terbatas pada penggunaan spreadsheet sederhana menyebabkan kegagalan dalam penyediaan laporan kinerja real-time maupun sistem peringatan dini (*early warning system*). Hal ini diperparah oleh lemahnya pengendalian internal yang masih bersifat personalistik di mana integritas pengurus lebih dominan dibandingkan

prosedur baku. Kelemahan ini termanifestasi dalam kaburnya pemisahan fungsi (*segregation of duties*), longgarnya penilaian kredit serta monitoring yang tidak terdokumentasi. Dampaknya melampaui aspek material ia mengerosi kepercayaan sosial dan mengancam keberlangsungan koperasi sebagai lembaga ekonomik komunitas. Ironisnya, adopsi teknologi finansial tanpa penguatan SIA yang memadai justru menciptakan paradoks digital yang memperlebar celah risiko dan potensi kecurangan (Sagala & Siregar, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa terjadinya kredit bermasalah umumnya bersumber dari ketidakefektifan sistem pengendalian internal. Kelemahan dalam proses analisis kelayakan pembiayaan, minimnya pengawasan setelah pencairan dana serta evaluasi kualitas kredit yang tidak dilakukan secara komprehensif merupakan faktor-faktor yang secara signifikan meningkatkan risiko munculnya kredit bermasalah. Temuan tersebut sejalan dengan konsep manajemen kredit yang menekankan urgensi penerapan analisis dan penilaian yang akurat guna memastikan keberlangsungan pembiayaan yang sehat (Ismanto et al., 2020; Sholekhah & Reviandani, 2024).

Bayangkan suatu koperasi simpan pinjam yang pada awal operasionalnya berjalan secara optimal karena banyak anggota memanfaatkan fasilitas kredit untuk mendukung usaha mikro. Namun, seiring berjalannya waktu, koperasi tersebut mulai menghadapi kendala ketika sebagian anggota tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman secara tepat waktu. Keterlambatan yang pada awalnya relatif kecil kemudian terakumulasi dan berkembang menjadi kredit bermasalah (Purbowati & Hendrawan, 2018).

Permasalahan ini tercermin melalui beberapa indikasi. Pertama, proses penyaluran kredit dilakukan tanpa didukung oleh analisis kelayakan yang komprehensif, misalnya koperasi hanya mengandalkan kepercayaan antar anggota tanpa melakukan evaluasi terhadap kapasitas pembayaran. Kedua, fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman belum berjalan secara efektif, sehingga dana yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan produktif justru digunakan untuk konsumsi. Ketiga, sistem pencatatan yang masih bersifat manual atau tidak terorganisir dengan baik menyebabkan

keterlambatan dalam mengidentifikasi potensi kredit bermasalah(Sholekhah & Reviandani, 2024).

Dampaknya, arus kas koperasi mengalami gangguan karena dana yang seharusnya kembali tidak dapat segera diterima. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam menyalurkan kredit baru kepada anggota lain, bahkan membuka peluang terjadinya kerugian. Apabila kondisi tersebut berlanjut, tingkat kepercayaan anggota akan menurun dan keberlanjutan koperasi dapat terancam (Tuka et al., 2026). Ilustrasi ini menegaskan bahwa risiko kredit bermasalah tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan anggota dalam membayar, melainkan juga berkaitan erat dengan kelemahan dalam pengendalian internal, sistem informasi, serta manajemen kredit yang diterapkan oleh koperasi.

Kondisi serupa juga tercermin pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Genteng, Banyuwangi mengalami peningkatan jumlah anggota dan jumlah kredit dalam beberapa periode terakhir. Peningkatan volume ini menuntut perbaikan dalam pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi agar kualitas portofolio kredit tetap terjaga. Indikator-indikator praktis yang sering terlihat di lapangan adalah masih mengalami kredit macet, dimana data nasabah dengan kredit macet pada KSP Artha Tunggal Makmur pada periode 2025, pada bulan Januari Desember mengalami naik turun (Fluktuatif) yang dimana hal ini memberatkan pada pihak KSP, menurut KSP Artha Tunggal Makmur terjadinya kredit macet ini disebabkan oleh beberapa indikasi, yakni seperti mudahnya percaya begitu saja pada data yang diterima, lemahnya sistem pemantauan kredit yang dilakukan oleh pihak KSP, kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh pihak KSP, ketidak pahaman mengajukan rencana penyelamatan/penyelesaian kredit, analisis kreditnya dangkal dan kurang lengkap, data kurang akurat dan kurang relevan dan lain sebagainya yang menyebabkan banyak nya terjadi masalah sehingga menyebabkan kredit macet. Sehingga kondisi demikian akan menyebabkan kerugian, karakter debitur yang tidak baik, dan debitur tidak bersikap transparansi terhadap pihak bank, sehingga dalam proses

penagihan kredit berlangsung, debitur menutup diri untuk dijumpai oleh pihak bank berikut data perolehan pinjaman keuangan nasabah KSP Artha Tunggal Makmur.

Tabel 1. 1 Ringkasan Perolehan Pinjaman Keuangan Nasabah KSP Artha Tunggal Makmur Per Januari – Desember 2025

No	Kategori	Debitur	OS	NPL
1	Lancar	412	Rp.2.566.521.441,00	-
	Dalam			
2	Perhatian	198	Rp.1.348.893.600,00	-
	Khusus			
3	Kurang	103	Rp.488.871.000,00	Rp. 488.871.000
	Lancar			
4	Diragukan	64	Rp.307.065.200,00	Rp. 307.065.200
5	Macet	63	Rp.204.323.700,00	Rp. 204.323.700
TOTAL		840	Rp.4.915.674.941,00	Rp.1.000.259.900

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 Ringkasan Perolehan Pinjaman Keuangan Nasabah KSP Artha Tunggal Makmur Periode Januari–Desember 2025 terlihat bahwa struktur kualitas kredit menunjukkan kondisi yang perlumendapatperhatianserius.Daritotal840debiturdengantotaloutstandingloan sebesar Rp4.915.674.941 mayoritas kredit berada pada kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus namun secara simultan terdapat proporsi kredit bermasalah yang relatif signifikan. Secara rinci, kategori kredit lancar mencakup 412 debitur dengan *outstanding* sebesar Rp2.566.521.441 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar nasabah masih mampu memenuhi kewajibanpembayaran sesuai jadwal.Sementaraitu,kategoriDalamPerhatian Khususberjumlah198debiturdengannilai*outstanding*Rp1.348.893.600yang menunjukkanadanyapotensi penurunankualitaskreditapabilatidakdilakukan pengelolaan risiko secara optimal. Fenomena yang menjadi perhatian utama terlihat pada kategori kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) yang terdiri dari Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.TotalNPLtercatat sebesarRp1.000.259.900atausekitar

20,35% dari total *outstanding* kredit. Angka ini tergolong relatif tinggi dan mencerminkan adanya peningkatan risiko gagal bayar yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan koperasi khususnya pada aspek likuiditas dan profitabilitas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun penyaluran kredit KSP Artha Tunggal Makmur cukup aktif, efektivitas pengelolaan risiko kredit dan kualitas analisis kelayakan pinjaman masih menghadapi tantangan. Tingginya proporsi kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya analisis kredit awal, kurang optimalnya pengawasan pascakredit serta faktor eksternal berupa ketidakstabilan kondisi ekonomi debitur. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut karena tingginya tingkat NPL berpotensi menurunkan kemampuan koperasi dalam menyalurkan kredit secara berkelanjutan dan meningkatkan risiko kerugian. Maka dari itu, diperlukan kajian empiris yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas kredit guna mendukung pengambilan keputusan manajemen yang lebih efektif dalam pengelolaan risiko kredit di KSP Artha Tunggal Makmur.

Sejalan dengan itu berbagai penelitian terdahulu menegaskan peran krusial pengendalian internal dalam upaya pencegahan kredit bermasalah. Kajian empiris terkait risiko kredit di negara berkembang menunjukkan bahwa faktor-faktor internal lembaga pembiayaan memiliki pengaruh dominan terhadap potensi terjadinya kredit bermasalah (Naili & Lahrichi, 2022). Selain itu, penelitian mengenai pengaruh risiko negara terhadap NPL mengungkapkan bahwa kondisi makroekonomi yang tidak stabil serta lemahnya sistem pengendalian internal dapat meningkatkan probabilitas terjadinya kredit bermasalah (Saliba et al., 2023). Penelitian lain yang menyoroti peran audit internal juga menunjukkan bahwa fungsi audit yang efektif mampu menekan risiko kredit bermasalah melalui peningkatan kualitas dokumentasi dan penguatan proses pengawasan (Lisa et al., 2023). Studi yang berfokus pada koperasi turut mengidentifikasi bahwa ketidaktepatan analisis kredit serta kelemahan dalam dokumentasi menjadi faktor utama terjadinya gagal bayar (Pirmansyah et al., 2023). Bahkan, penelitian mengenai dampak NPL terhadap

pertumbuhan lembaga keuangan menunjukkan bahwa tingginya rasio NPL dapat menghambat perkembangan institusi, terutama apabila tidak didukung oleh kecukupan modal dan skala organisasi yang memadai (Arhinful et al., 2025).

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berfokus pada sektor perbankan atau koperasi berskala besar yang memiliki sumber daya relatif memadai. Berbeda dengan kondisi tersebut koperasi daerah seperti KSP Artha Tunggal Makmur menghadapi tantangan yang lebih kompleks mulai dari keterbatasan kualitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan lapangan, hingga inkonsistensi dalam penerapan standar prosedur operasional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sistem pengendalian internal diterapkan secara nyata di lapangan serta sejauh mana audit lapangan yang dilakukan oleh kantor pusat berkontribusi dalam memperkuat fungsi pengendalian dan menurunkan risiko kredit bermasalah. Dalam konteks manajemen kredit lembaga keuangan, penerapan analisis kredit yang sistematis dan didukung oleh struktur pengendalian internal yang kuat merupakan prasyarat utama dalam menjaga kesehatan portofolio kredit (Ismanto et al., 2020).

Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel tidak terlepas dari peningkatan volume maupun nilai penjualan yang berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Dalam konteks tersebut, pengendalian internal berperan penting sebagai mekanisme yang membantu perusahaan dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Penerapan pengendalian internal yang memadai memungkinkan perusahaan menjalankan aktivitas operasional secara optimal serta meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan. Selain itu, pengendalian internal yang efektif mendukung penyajian informasi keuangan yang akurat dan andal dalam laporan keuangan. Maka dari itu, sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal perlu diimplementasikan secara terintegrasi, mengingat sistem informasi akuntansi memiliki peran strategis dalam menunjang efektivitas pengendalian internal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana “*PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP RISIKO KREDIT BERMASALAH(STUDIEMPIRISPADAKOPERASISIMPANPINJAM ARTHATUNGGALEMAKMUR GENTENG,KABUPATEN BANYUWANGI)*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap risiko kredit bermasalah KSP Artha Tunggal Makmur ?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap risiko kredit bermasalah KSP Artha Tunggal Makmur ?
3. Apakah sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara bersama-sama terhadap risiko kredit bermasalah KSP Artha Tunggal Makmur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis **Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Risiko Kredit Bermasalah** pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Genteng, Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk menguji dan menganalisis **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Risiko Kredit Bermasalah** pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Genteng, Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk menguji dan menganalisis **Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Secara Bersama-Sama (Simultan) Terhadap Risiko Kredit Bermasalah** pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi keuangan dan audit, mengenai pentingnya peran sistem informasi dan mekanisme pengendalian dalam meminimalisir risiko kegagalan kredit pada lembaga koperasi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan peneliti terkait dengan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap risiko kredit bermasalah.
- b. Bagi Perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk perusahaan dalam mengevaluasi sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal terhadap risiko kredit bermasalah.
- c. Bagi Akademisi, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sumber referensi yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan risiko kredit bermasalah.